



Buletin Parlementaria

Legislator Harapkan Pemerintah Konsisten Kembangkan KEK Mandalika



3 Sesalkan Bentrokan di Rempang, Aparat Harus Lebih Persuasif



21 Baleg dan Komisi VII Sepakati RUU Migas Jadi Usul Inisiatif DPR RI

Nomor 1263/II/IX/2023 • September 2023



9 772614 339005



Legislator Harapkan Pemerintah Konsisten Kembangkan KEK Mandalika

Pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI, Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun mengungkapkan,

bahwa pemerintah harus menjaga konsistensi dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan kebijakan terintegrasi. Misbakhun pun mencontohkan dengan lomba MotoGP di Mandalika sebagai daya tarik utama, bisa dipertahankan untuk event internasional dalam jangka waktu yang panjang.

"Pemerintah harus konsisten untuk mengembangkan KEK Mandalika dalam sebuah *policy* yang terintegrasi. Yang bagaimana MotoGP sebagai daya tarik utamanya, dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang," kata Misbakhun di Lombok, NTB pada hari Jumat (8/9). Menurutnya, rencana alokasi anggaran tahun 2024 menunjukkan dukungan pemerintah kepada InJourney (Indonesian Journey), holding BUMN yang berperan dalam pariwisata KEK Mandalika mengelola aset besar dan berpotensi.

"Ini (Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI) adalah rencana terkait dengan PMN (Penyertaan Modal Negara) di APBN 2024 kepada InJourney yaitu salah satu BUMN Holding yang berkaitan dengan pariwisata. Paling utama adalah KEK Mandalika yang ternyata mengelola aset yang sangat besar dan sangat potensial," tukas Politisi Fraksi Partai Golkar.

Misbakhun meminta pemerintah



Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Mandalika, Lombok, NTB pada hari Jumat (8/9/2023).

untuk aktif dalam mengenalkan KEK Mandalika kepada dunia melalui kebijakan-kebijakan mendukung dan alokasi anggaran yang memadai. "Pengenalan kepada masyarakat dunia harus mulai dilakukan, harus melalui intervensi negara. Melalui kebijakan-kebijakan yang afirmatif, baik dari sisi aturan maupun dari sisi anggaran. Sehingga upaya-upaya bisnis rintisan ini diinisiasi oleh negara," tegasnya.

Dia optimis bahwa dengan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur dasar. Sektor swasta dan masyarakat akan ikut berinvestasi, mendukung pertumbuhan pariwisata di KEK Mandalika. "Kalau negara yang turun tangan menunjukkan keseriusannya membangun infrastruktur dasar, maka saya yakin swasta dan

masyarakat akan datang. Dalam bentuk apapun, maupun investasi *corporate* atau pribadi untuk ikut meramaikan peluang bisnis dalam pariwisata yang ada," ujar Legislator Dapil Jatim II.

Lebih dari sekadar dukungan, Misbakhun menekankan perlunya konsistensi pemerintah dalam alokasi anggaran dan kebijakan untuk memajukan KEK Mandalika, memastikan keseriusan dalam pengembangan pariwisata di Pulau Lombok. "Bukan cuma sekedar mendukung tetapi meminta pemerintah konsisten dari sisi afirmasi anggaran maupun dari sisi kebijakannya. Sehingga secara jangka panjang, membangun kawasan ini (KEK Mandalika) menunjukkan keseriusan pemerintah," tutupnya.

mun/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Sesalkan Bentrokan di Rempang, Aparat Harus Lebih Persuasif



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. FOTO: EOT/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani menyayangkan peristiwa bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau antara warga dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Ia menekankan, perlunya pendekatan secara humanis yang mengedepankan persuasi dengan warga.

"Sekalipun ada penolakan dari masyarakat, semestinya tidak perlu ada tindakan represif. Seharusnya aparat bisa lebih humanis dan bersifat persuasif untuk berdialog bersama warga," kata Puan di Jakarta, Jumat (8/9).

Diketahui, bentrokan dipicu oleh penolakan masyarakat adat Pulau

Rempang atas Pembangunan kawasan industri di lahan pulau seluas 17 ribu hektare. Proyek yang dilabeli dengan proyek strategis nasional untuk membangun kawasan industri, perdagangan, dan wisata itu merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2023 sebagai Rempang *Eco City*.

Mantan Menko PMK ini menilai, penolakan dalam pembangunan biasa terjadi. Menurut Puan, penolakan-penolakan tersebut seharusnya disikapi dengan cara-cara kemanusiaan dan bersifat persuasif. "Apalagi jika pembangunan ini demi peningkatan perekonomian rakyat, maka jangan sampai merugikan rakyat," tegasnya. **bia/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirta, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Fista Dysie, Ballegg Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasni Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Ria Damayanti

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Tiga Anggota PAW Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2024 Dilantik



FOTO: AFR/PDT

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat memimpin sumpah atau janji pelantikan tiga Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024 resmi melantik tiga Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan periode 2019-2024. PAW tersebut terdiri dari, yaitu Fraksi Partai NasDem dengan nama Indira Chunda Thita Syahrul dari Dapil Sulawesi Selatan I dan Ujang Iskandar dari Dapil Kalimantan Tengah, serta Fraksi PKS dengan nama Wisnu Wijaya Adi Putra dari Dapil Jawa Tengah I.

Sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, ketiga Anggota Pengganti Antar Waktu itu pun mengucapkan

sumpah atau janji secara bersama-sama sebelum memangku jabatan. Sumpah tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus.

"Patut saya ingatkan, bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumpah ini adalah terhadap Tuhan yang maha esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudari mengikuti lafal sumpah yang akan

saya pandu," ucap Lodewijk saat memimpin sumpah di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mewakili segenap pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pun mengucapkan selamat kepada ketiga Anggota Pengganti Antar Waktu yang telah resmi bergabung. "Semoga tetap Amanah dan dengan bergabungnya saudara akan lebih memperkuat pelaksanaan tugas konstitusional dewan," ujarnya saat kembali memimpin Rapat Paripurna se usai melakukan upacara sumpah.

 gal/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Disahkan di Paripurna, RUU P2APBN Resmi Jadi Undang-Undang

DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (RUU P2APBN). Dari Pembicaraan Tingkat I di Badan Anggaran DPR RI, sebanyak 8 (delapan) fraksi memberikan persetujuan dan 1 (satu) fraksi menyetujui atau menerima dengan catatan (*minderheids nota*) nota RUU P2APBN TA 2022.

"Tadi telah kita dengarkan 8 fraksi setuju dan 1 fraksi setuju dengan catatan. Selanjutnya, kami akan bertanya kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dapat disetujui untuk disahkan jadi UU?," ujar Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel, saat memimpin Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).

Setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh fraksi, Politisi Fraksi Partai NasDem itu itu pun kembali mengajukan pertanyaan serupa yang ditujukan kepada setiap anggota yang datang. Selanjutnya Wakil Ketua DPR RI Koordinator



Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna di Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Bidang Industri dan Pembangunan itu mengetuk palu sidang yang menandakan pengesahan UU P2APBN dengan persetujuan anggota dewan.

RUU P2APBN 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN kepada DPR yang disampaikan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). LKPP disusun oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik

Indonesia setiap tahunnya sejak 2024.

Dalam kesempatan tersebut, hadir Menteri Keuangan RI sebagai perwakilan pemerintah. Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi kepada DPR untuk kelancaran pembahasan UU tersebut. Menkeu berharap kerja sama antara Pemerintah dan DPR dapat terus terjalin dalam mengelola APBN. Menurutnya, dengan keuangan negara yang sehat dan kredibel, maka Indonesia memiliki pondasi ekonomi dan demokrasi yang kuat untuk menghadapi tantangan hari ini ke depan. uc/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



DPR Sambut Gembira Kerangka Kerja Ekonomi Biru Dalam KTT ASEAN

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyambut gembira tentang adanya adopsi kerangka kerja ekonomi biru dalam momen Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN. Mengingat, Indonesia memiliki laut yang sangat luas, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan sebagai negara tropis Indonesia juga memiliki potensi air tawar yang besar.

"Semua potensi itu bisa menjadi magnet dalam ekonomi biru, khususnya di bidang pangan, energi, wisata, dan riset. Tantangannya adalah bagaimana mengoptimalkan semua potensi tersebut menjadi keuntungan nyata bagi Indonesia dan berkontribusi bagi dunia," ungkap Gobel, Senin (11/9).

Pimpinan Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini mengakui Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya tambang mineral, serta potensi pasar yang besar sehingga, bisa berkontribusi besar dalam ekosistem kendaraan listrik maupun ekonomi digital. Namun demikian, Gobel menyayangkan Indonesia hingga saat ini masih menjadi objek dunia.

Akan tetapi, Gobel percaya dengan ide, prakarsa, dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia akan mendapat kepercayaan investor global dalam membangun ekosistem kendaraan listrik maupun ekonomi

digital. "Kuncinya adalah pada kemampuan para menternya dalam menerjemahkan visi Presiden. Jangan ada *vested interest* (kepentingan pribadi) agar investor dunia percaya. Kita memiliki segalanya untuk mewujudkan semua potensi yang ada," tukas Gobel.

Pada bagian lain, Politisi Fraksi Partai NasDem ini, mengatakan, teknologi ramah lingkungan tak hanya kendaraan listrik, tapi juga mencakup beragam produk industri, termasuk di bidang elektronika. "Banyak hal yang harus disiapkan dan dikerjakan," tandas Gobel.

Lebih lanjut, Legislator Dapil Gorontalo tersebut mengingatkan, investasi teknologi membutuhkan kepercayaan yang besar. "Karena butuh dana besar dan berjangka panjang maka tidak boleh ada

ruang untuk bermain untung jangka pendek. Nanti dapatnya teknologi sisa," tegas Gobel.

Selain itu, Gobel juga mengatakan bahwa masih banyak pekerjaan rumah bagi Indonesia untuk mewujudkan semua kesepakatan yang dihasilkan dalam KTT ke-43 ASEAN. "Kita sudah memiliki omnibus law UU Cipta Kerja, namun masih banyak regulasi turunannya yang belum terwujud serta perilaku yang belum seirama sehingga kemudahan berinvestasi dan kepastian hukum masih menjadi masalah," pungkas Gobel. ➡ **pun/aha**



Rizki Natakusumah: Jangan Sampai Ada Kompromi Soal Kedaulatan Negara

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah menekankan agar jangan sampai ada kompromi soal kedaulatan yang menyangkut pertahanan negara. Ia menilai seharusnya komitmen pemerintah terhadap ketahanan bisa menyamai komitmen kepada penjagaan nilai-nilai kebangsaan, baik itu Pancasila dan lain sebagainya.

"Ketua (Komisi I) sering menyampaikan bukti atau wujud konkret dari keberpihakan adalah keberpihakan anggaran," tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat Panja BUMN Industri Pertahanan (BUMNIP) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

Lebih lanjut, ia menilai bahwa industri pertahanan dalam negeri sangat butuh didukung, tidak hanya dari segi politik namun juga juga kebijakan anggaran yang diambil oleh pemerintah itu sendiri. "Sebagai contoh penyertaan modal negara, saya harapkan Pak Deputi dari Bappenas lebih bisa berteriak lagi dalam penyusunan PMN atau penyertaan modal negara yang diberikan kepada industri dalam negeri," jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Ia menyoroti Banyak BUMN pelat merah yang hanya membuat utang justru diperhatikan oleh negara. Di sisi lain, ia menilai bahwa komisi I sering sekali disebut menjadi *very lonely commission* karena di saat masyarakat membutuhkan bantuan, Komisi I justru menyuarakan terkait pertahanan.

"Menteri Pertahanan menyampaikan ke kita ada rencana induk baru katanya baru 25 tahun ke depan tapi kalau tidak ada keberpihakan kepada industri pertahanan dalam negeri soal pertahanan sama aja bohong," tegasnya.

Maka dari itu dirinya berharap implementasi dukungan BUMNIP dari berbagai pihak. "Kita meminta masukan dari Lemhanas terkait dengan *roadmap* peningkatan Kapasitas industri pertahanan ke depan seperti apa? Kita meminta penjelasan dari deputi Polhukam untuk, bagaimana ke depan harus bisa disusun *roadmap* yang lebih jelas lagi, terkait dengan penyertaan modal negara yang berpihak kepada industri pertahanan dan lain sebagainya," tutupnya.

Diketahui komisi I DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja BUMNIP Komisi I DPR RI bersama dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu, Deputi bidang Politik Hukum Pertahanan

dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas

Adapun agenda dalam rapat ini, yaitu membahas kebijakan strategis Indhan (Industri Pertahanan) yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan Indhan nasional, kinerja holding BUMN Indhan untuk kepentingan bangsa dan negara, urgensi revitalisasi Indhan menuju Indhan yang unggul dan yang berdaya saing, tinjauan Indhan dari sisi SWOT, dan pendanaan untuk biaya investasi Indhan yang berdaya saing. ➡ [ail](#), [laz](#), [hal](#)/rdn



FOTO: FHN/PDT

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Panja BUMN Industri Pertahanan (BUMNIP) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kunjungan Parlemen Portugal Buka Peluang Kerja Sama Bidang Keamanan Laut dan Pemberantasan Narkoba

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid bersama Anggota Komisi I Rachel Mariam

Sayidina dan Dave Akbarshah Fikarno menerima kunjungan kehormatan dari perwakilan Parlemen Portugal. Diungkapkan Meutya, pertemuan ini membuka peluang kerja sama antara Indonesia dan Portugal dalam bidang kelautan hingga perlawanan untuk memerangi narkoba.

"Tadi disampaikan beberapa, mungkin yang dengan parlemen Indonesia adalah lebih banyak pertukaran *parliament to parliament*. Karena saat ini karena posisi yang cukup jauh secara geografis, jadi pertukaran antar parlemen masih kurang," ujar Meutya usai Rapat Kerja Komisi I di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta (7/9).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyampaikan, pertemuan dengan Parlemen Portugal akan lebih sering dilakukan guna membahas kemungkinan kerja sama dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla). "Karena memang mereka punya keunggulan di bidang kelautan dengan wilayah mereka yang berdekatan dengan Spanyol begitu ya. Jadi mereka punya pengamanan laut yang luar biasa, ini juga bisa kita



FOTO: MR/PDT

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid bersama Anggota Komisi I Rachel Mariam Sayidina dan Dave Akbarshah Fikarno menerima kunjungan kehormatan dari perwakilan Parlemen Portugal di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta (7/9/23).

kerjasamakan," sambungnya.

Selain membuka peluang terkait keamanan laut, Meutya juga mengungkapkan pihaknya tengah mendorong kerjasama antara BNN dengan Portugal dalam memerangi masalah narkoba. Ia juga menegaskan bahwa sebelumnya penyelesaian terkait dengan masalah ini dilakukan dengan sangat baik di kota Lisbon, Portugal.

"Tidak terkait langsung dengan Komisi I, tapi kerja sama luar negeri saya rasa juga masih dalam ranah Komisi I. Kerja sama untuk memerangi narkoba. Tadi beliau duta besarnya menawarkan kerja sama untuk bidang itu dengan BNN yang

sekarang sebetulnya sudah dimulai. Tinggal DPR mendorong untuk kerja sama ini bisa betul-betul berjalan," ungkap Meutya.

Lebih lanjut Meutya juga menambahkan perlu adanya pertemuan non governmental yang tidak bersifat kaku dan juga bersifat *friendship group* agar menjadi satu kesepahaman yang baik. "Tapi tentu harus banyak pertemuan-pertemuan yang *non governmental* ya. Kalau *governmental* saja kan mungkin biasanya lebih terstruktur, mungkin sedikit lebih kaku. Lebih kepada *friendship group* yang kita harapkan bisa menjadi dasar kerja sama yang lebih memiliki kesepahaman yang baik," tutupnya.

we,far/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Masa Pendaftaran Capres Maju, Konsekuensi UU Pemilu yang Baru

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan usulan KPU untuk memajukan masa pendaftaran capres-cawapres menjadi 10 Oktober adalah konsekuensi dari ditetapkannya Perppu Pemilu menjadi UU Nomor 7 Tahun 2023. Sehingga, menurut dia, ada penambahan rentang waktu antara penetapan calon dengan jadwal kampanye.

"Memajukan pendaftaran calon presiden itu konsekuensi dari berubahnya salah satu pasal di UU No.7/2017 akibat dari adanya Perppu. Sebelumnya, penetapan pasangan capres tiga hari sebelum masa kampanye. Kalau masa kampanye 28 November, berarti penetapan pasangan calon itu 25 November. Maka otomatis pendaftaran di sekitar bulan November," kata Saan dalam keterangannya yang dikutip **Parlementaria**, Sabtu (9/9).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan, dalam UU No.7/2023 penetapan calon presiden dan wakil presiden adalah 15 hari sebelum masa kampanye. Sementara, penetapan calon legislatif adalah 25 hari sebelum masa kampanye. "Kalau kampanye tanggal 28 November, berarti penetapan calon pasangan presiden 13 November. Dan itu disetujui di dalam Perppu antara penyelenggara, pemerintah, dan Komisi II DPR menyetujui itu," lanjut Saan.

Berdasarkan PKPU 3/2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu

2024, masa pendaftaran pencalonan dimulai pada 19 Oktober hingga 25 November 2023, sedangkan jadwal kampanye adalah 28 November 2023. "Karena penetapan pasangan calonnya 13 November, maka otomatis pendaftarannya pun menjadi lebih awal. Setelah ditarik ke depan kan ada verifikasi berkas persyaratan, ada pemeriksaan kesehatan, misalnya kalau tidak memenuhi syarat parpol diberi kesempatan untuk mengajukan pasangan baru, setelah dihitung ya pendaftaran di tanggal 10-16 Oktober," jelas Saan.

Saan juga mengatakan, tidak ada masalah dengan usulan KPU untuk memajukan jadwal pendaftaran itu. Ia menyebut draf PKPU akan dibahas dalam rapat di Komisi II DPR. "Jadi itu sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, itu tidak ada masalah. Tinggal nanti draf yang telah disusun KPU nanti dikonsultasikan dengan DPR dan

Pemerintah yang maju penetapannya bukan hanya calon presiden, penetapan DCT untuk legislatif juga lebih cepat, itu 25 hari itu KPU mintanya. Kalau penetapan pasangan calon presiden 15 hari, kalau legislatif 25 hari," jelasnya.

Saan mengatakan usulan pemajuan jadwal pendaftaran itu hanya persoalan teknis penyelenggara KPU. Ia menyebut, KPU meminta tambahan waktu untuk pengadaan dan distribusi logistik pemilu. "Ini semua terkait dengan pengadaan dan distribusi logistik. Jadi tiga hari sebelum kampanye KPU merasa waktunya untuk pengadaan dan distribusi logistiknya itu takut nggak kekejar, karena pendek. Jadi itu lebih kepada soal teknis penyelenggara dari KPU terkait pengadaan dan distribusi logistik saja. Jadi kertas harus dicetak, didistribusikan," tutup Saan. **we/aha**

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa.



FOTO: AFR/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Gus Awiek Usul Pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online

Semakin maraknya judi *online* semakin meresahkan dunia maya. Pasalnya, dampak judi *online* telah membahayakan masyarakat dan memakan tidak sedikit korban, utamanya masyarakat kalangan bawah. Melihat fenomena tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Achmad Baidowi mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) pemberantasan judi *online*.

Satgas ini sebutnya, terdiri dari lintas sektoral dan instansi, baik Polri, Kemenkominfo, OJK, PPATK dan masyarakat. "Kami ingin Satgas ini di bawah langsung Menkopolkum Mahfud MD. Ini sudah darurat dan korbannya masyarakat bawah," kata Gus Awiek, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi kepada media, di Jakarta, Rabu (6/9).

Gus Awiek juga mengungkapkan tindakan Kemkominfo yang memblokir akun-akun pengguna judi *online* perlu diikuti oleh instansi lain. Pihak OJK dan PPATK perlu juga melakukan pengawasan dan pemblokiran terhadap rekening yang diduga menjadi sarana transaksi mencurigakan dari judi *online*.

Berdasarkan laporan PPATK pada 2022 ada Rp155 triliun yang diduga bagian transaksi mencurigakan dari judi *online*. Jumlah ini diprediksi akan

naik pada 2023 hingga Rp200 triliun. Melihat data dengan nilai transaksi yang cukup fantastis tersebut, Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta pemerintah untuk gerak cepat memberantasnya.

"Jika perlu ada sikap tegas pemerintah tentang perang melawan judi. Sebab dampaknya sudah sangat membahayakan bagi masyarakat kita," jelasnya. Selain itu, Awiek juga menyoroti fenomena influencer dan selebriti yang menjadi agen promo judi *online*. Ia menilai perlu edukasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis *game online* yang masuk kategori judi.

"Kita perlu edukasi masyarakat tentang jenis-jenis *game online* apa saja yang masuk kategori judi. Banyak anak-anak tak paham mengenai *game online* yang dimanfaatkan untuk judi," ungkapnyanya.

— **bia/rdn**

Anggota Komisi III DPR RI Achmad Baidowi.



FOTO: DEP/PTT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota DPR Dukung Program Pencegahan Intoleransi dan Radikalisme

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mendukung Program Pembangunan Desa Siap Siaga, Desa Damai dan Pembangunan Sekolah Damai yang digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI). Menurut Taufik, program Kesiapsiagaan Nasional harus dilakukan dan ditingkatkan demi melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme jelang tahun politik 2024.

BNPT, kata Taufik, perlu meningkatkan program pencegahan intoleransi dan radikalisme dengan melihat fenomena oknum masyarakat yang tidak menghormati dan menghargai hak beribadah orang lain. "Kami berharap, ada program yang memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memiliki penghormatan hak untuk beribadah," jelas Taufik saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama BNPT RI di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (4/9).

Hal senada disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Agung Budi Santoso. Menurutnya, program kesiapsiagaan nasional akan sangat berpengaruh dalam menghalau kelompok-kelompok yang berusaha mengganggu ataupun mengacaukan jalannya pemerintahan.

"Kami mendukung BNPT karena memang situasi 2023 ini sudah mulai menghangat. Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan

oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganggu atau ingin mengacaukan jalannya pemerintahan ataupun jalan terhadap situasi untuk pergantian dari pimpinan negara ini. Ini tentunya perlu dikawal dengan tepat," ujarnya.

BNPT RI berkomitmen untuk membangun ketahanan masyarakat dari ideologi radikalisme. Hal tersebut disampaikan Kepala BNPT RI Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel. Menurutnya langkah tersebut, diambil guna mewujudkan visi Indonesia Damai, Indonesia Tanpa Kekerasan, dan Indonesia Harmoni terutama menjelang tahun politik 2024.

Rycko menjelaskan, komitmen tersebut diimplementasikan melalui Program Pembangunan Desa Siap Siaga-Desa Damai dan Pembangunan Sekolah Damai. "Dalam

rangka membangun ketahanan desa yang toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme, kami menginisiasi hadirnya Desa Siap Siaga," ujarnya.

Terkait program Sekolah Damai, Kepala BNPT RI mengatakan bahwa Indonesia perlu memiliki sekolah yang toleran dan memiliki moderasi beragama yang baik. "Kita perlu membangun sekolah yang toleran, moderasi beragama, dan memiliki ketahanan terhadap masuknya ideologi radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme," jelasnya.

— ssb/aha



FOTO:RSB/PDT

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama BNPT RI di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Realisasi PNBP Naik, Abdullah Tuasikal Apresiasi Kenaikan Pagu Anggaran 2024 KKP

Anggota Komisi IV DPR RI Abdullah Tuasikal mengapresiasi Pagu

Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun Anggaran 2024 yang mengalami kenaikan serta mengapresiasi kinerja kementerian tersebut dalam realisasi PNBP. Ia berharap peningkatan anggaran tersebut dapat diikuti dengan peningkatan kinerja dan penyerapan anggaran.

”

KAMI JUGA MENGAPRESIASI KINERJA (KKP) DALAM REALISASI PNBP. SEPERTI YANG KITA TAHU BERSAMA SALAH SATU UPAYA KKP UNTUK MENINGKATKAN PNBP SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN ADALAH KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR.

”Kami juga mengapresiasi kinerja (KKP) dalam realisasi PNBP. Seperti yang kita tahu bersama salah satu upaya KKP untuk meningkatkan PNBP sektor kelautan dan perikanan

adalah kebijakan penangkapan ikan terukur. Kami kira bawa penangkapan ikan terukur ini, ya realisasinya sudah mulai jalan nih,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9).

Terkait dengan kebijakan penangkapan ikan terukur tersebut, Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menunggu regulasi mengenai penangkapan ikan tersebut untuk segera selain. Serta berharap adanya peningkatan infrastruktur yang juga perlu menjadi perhatian bagi KKP untuk mendukung program penangkapan ikan terukur tersebut. “Agar pelabuhan penerapan pendaratan ikan, itu juga bisa, artinya bisa mewadahi kegiatan-kegiatan pembongkaran dan lain-lain,” tuturnya.

Selain itu, Abdullah Tuasikal juga menyampaikan hasil kunjungannya Badan Penelitian dan Pendidikan di Kota Ambon. Di BP3 Kota Ambon tersebut memiliki kegaatan-kegiatan pembenihan lobster dengan tingkat keberhasilannya sudah mencapai sekitar 90 persen. Namun BP3 Ambon belum memiliki lisensi. “Saya harapkan agar kalau dapat dari (KKP) bisa, bisa bersama-sama dengan atau ya dengan kepala balai yang ada di sana, itu agar kegiatan pembenihan lobster ini menjadi perhatian,” tandasnya.



FOTO:AFR/PDT

Anggota Komisi IV DPR RI Abdullah Tuasikal saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2023).

[laz.gov/rdn](https://www.laz.gov/rdn)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pemerintah Diharapkan Bergegas Atasi Tren Kenaikan Harga Beras

Anggota Komisi IV DPR RI Edward Tannur menyoroti mengenai tren kenaikan harga beras yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Ia mendorong pemerintah untuk bergegas antisipasi dengan melibatkan seluruh lembaga yang berkaitan dengan stabilisasi pangan.

"Memang lagi ngetren itu kenaikan harga beras. Bergegas memang perlu dilakukan antisipasi secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Perlu ada kerja sama yang baik dengan Kementerian Pertanian, Bulog dan lain-lain kementerian yang terkait di dalamnya yang berurusan dengan stabilisasi harga pangan," ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Badan Pangan Nasional di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9).

Ia pun merasa bingung dan meminta penjelasan kepada Badan Pangan Nasional. Karena menurutnya saat ini stok impor berkecukupan khususnya beras, tetapi harga beras di masyarakat semakin hari selalu naik terus.

"Mengenai stabilisasi harga, stoknya ada. Tapi di satu sisi harga di pasaran terus merangkak naik. Mungkin ada hal-hal khusus yang perlu dilakukan antisipasi, mungkin operasi pasar atau apa dan lain-lain sebagainya untuk

”

MEMANG LAGI NGETREN ITU KENAIKAN HARGA BERAS. BERGEGAS MEMANG PERLU DILAKUKAN ANTISIPASI SECEPAT-CEPATNYA DAN SEBAIK-BAIKNYA.

menjamin. Agar masyarakat kita jangan sampai keberadaannya sulit, El Nino sudah bikin sulit, beras naik lagi, tambah sulit lagi sebentar lagi, suhu naik lagi, udara kotor lagi," tuturnya.

Selain itu, Politisi Fraksi PKB itu juga menyoroti mengenai ketersediaan jagung di pasaran yang saat ini mulai rawan. Hal ini perlu menjadi perhatian juga bagi pemerintah karena komoditas jagung ini bukan hanya mengenai konsumsi bagi manusia tetapi juga diperuntukkan untuk pakan ternak.

"Kalau kita kasih makan sapi atau ayam makan beras kita itu artinya yang pelihara ayam itu bangkrut nanti, nanti jual lagi harga telur jatuh, harga ayam potong jatuh, lagi artinya ini kita bukan membantu masyarakat kita tetapi mau mematikan masyarakat ini. Jadi harus dipikirkan untung ruginya menyangkut masalah. Pakan-pakan yang kita siapkan dan bukan hanya manusia saja, semua makhluk hidup butuh makan," pungkasnya. ➡ arn.gal/rdn



FOTO: AFR/PDT

Anggota Komisi IV DPR RI Edward Tannur saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV dengan Badan Pangan Nasional di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi V Dukung Pasar Induk Among Tani sebagai Destinasi Wisata Kota Batu

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Pasar Induk Among Tani di Kota Batu. Pasar ini telah rampung direvitalisasi pada Mei 2023 lalu dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp166,7 miliar.

Tidak hanya sebagai pasar, Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati mendukung Pasar Induk Among Tani Kota Batu ini sebagai tempat wisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu.

”

PASAR INI BISA MENJADI SATU PERCONTOHAN KARENA MENJADI PASAR TRADISIONAL YANG DIBANGUN KEMBALI DENGAN KONSEP MODERN DAN GREEN BUILDING DI MANA TIDAK BANYAK MENGGUNAKAN LISTRIK SERTA SIRKULASI UDARANYA YANG DIBUAT SEMAKSIMAL MUNGKIN.

Mengingat pasar ini menjadi pasar terbesar di Jawa Timur dengan luas mencapai 6.032,86 meter persegi dengan daya tampung 2.630 pedagang.

”Pasar ini bisa menjadi satu percontohan karena menjadi pasar tradisional yang dibangun kembali dengan konsep modern dan *green building* di mana tidak banyak menggunakan listrik serta sirkulasi udaranya yang dibuat semaksimal mungkin karena Kota Batu Kebetulan memang daerah yang cukup sejuk. Saya kira ini sudah menjadi satu solusi untuk pengurangan dari efek rumah kaca,” ujarnya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Batu, Jawa Timur, Jumat (8/9).

Selain itu, Politikus Fraksi PDIP itu menekankan pentingnya penataan tempat untuk para pedagang serta perlu dikasifikasikan sesuai dengan jenis usahanya. Begitu juga dengan fasilitas penunjang seperti lahan parkir dan toilet untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengunjung.

”Pedagangnya beragam mulai dari makanan, tekstil, bahkan juga ada pedagang emas. Ini harus dipisahkan penempatannya. Begitu pula untuk ketersediaan fasilitas umum seperti lahan parkir dan juga yang paling penting di setiap pasar itu adalah toiletnya,” pungkasnya.

ais/aha



FOTO: AIS/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Batu, Jawa Timur, Jumat (8/9/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Jangan Sampai Perjanjian Perdagangan Membuat Bebasnya Produk Impor Kuasai Domestik

Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tampubolon berharap setiap perjanjian perdagangan yang diratifikasi dapat membawa manfaat yang baik untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebab, ia melihat adanya perjanjian perdagangan Indonesia dengan berbagai negara lain, membuat begitu bebasnya produk-produk dari luar negeri masuk ke Indonesia.

Ia tidak ingin, produk dalam negeri (domestik) nantinya justru tidak dapat terlindungi dari gempuran produk-produk impor. Karena, sebenarnya, tujuan perjanjian perdagangan adalah agar produk-produk dalam negeri mendapat akses pasar yang lebih luas di luar negeri.

"Bukan (hanya) kita yang menjadi pasar mereka. Walaupun memang harus sama-sama *win-win solution*, harus sama-sama menguntungkan. Tetapi, harapan kita, kita bisa mendapatkan akses pasar yang jauh lebih besar di negara sana. Bukan barang-barang kita, produk-produk dalam negeri kita yang terkuras habis dan tidak bisa berdaya saing," jelasnya dalam Raker Komisi VI dengan Kemendag di Gedung

Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/9).

Untuk itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini meminta Kemendag untuk memberikan perhatian khusus dalam melindungi produk-produk dalam negeri. Sehingga produk-produk lokal tidak justru kalah saing dengan produk impor.

"Nah ini harus mendapat perhatian khusus untuk bagaimana nanti langkah-langkah dari Kementerian Perdagangan untuk dapat melindungi ini. Apakah ada evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian perdagangan yang sudah dilaksanakan selama ini terutama Indonesia-China CEPA mungkin. Karena ternyata barang-barang dari sana itu banyak sekali," lanjutnya.

Diketahui, sebelumnya, Komisi VI telah menyetujui Protokol Perubahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile untuk Penggabungan Ketentuan-Ketentuan Perdagangan Jasa yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden.

— **bia/rdn**



FOTODEP/PDT

Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tampubolon saat mengikuti Raker Komisi VI dengan Kemendag di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Komisi VII Dorong PT Agincourt Tingkatkan Kapasitas Produksi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mendorong PT Agincourt Resources (PTAR) sebagai perusahaan pemegang izin usaha eksplorasi dan pengolahan emas di Martabe untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi kepada negara dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bambang dalam pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Wakil Presiden Direktur Agincourt Resources Ruli Tanio beserta jajaran yang digelar secara virtual di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (1/9). "Dalam penjelasan tadi disampaikan PT Agincourt sudah bisa menyerap tenaga kerja sekitar 3.000 orang dan kami ingin mendorong Agincourt meningkatkan kapasitas produksinya sehingga membuka ruang kerja semakin besar," ujar Bambang Haryadi.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan, Tambang emas Martabe merupakan salah satu lokasi yang memiliki kandungan emas yang tinggi. Diketahui pada tahun 2022, produksi emas dari Tambang Martabe mencapai 280.000 ons. Meski kapasitas produksi perlu ditingkatkan, Bambang mengingatkan agar perusahaan tetap menerapkan praktik tambang berkelanjutan (*sustainable mining*).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi VII juga mempertanyakan skema perpanjangan Kontrak Karya (KK) PTAR yang akan

berakhir pada 2027 mendatang. Terkait masalah perpanjangan KK, Bambang mengatakan, jika mengacu pada UU No 3 Tahun 2020, khususnya Pasal 169B, ayat (2) disebutkan pengajuan permohonan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak dilakukan paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum KK berakhir.

"Yang artinya proses perpanjangan KK menjadi IUPK kelanjutan operasi kontrak sudah dapat dilakukan oleh PTAR. Namun, untuk memperoleh perpanjangan menjadi IUPK Kelanjutan Operasi Kontrak, PTAR berkewajiban untuk memenuhi atau melaksanakan seluruh kewajiban yang tertuang di dalam KK," ungkap dia.

Terkait hal ini, Bambang mengatakan akan memanggil Kementerian ESDM untuk dilakukan pembahasan secara mendalam. "Kami perlu mendengar penjelasan dari Kementerian ESDM karena kebetulan pihak dari Kementerian ESDM karena kebetulan pihak yang hadir disini kurang begitu mengetahui secara detail. Nah, untuk itu kita akan agendakan melakukan pendalaman bersama Dirjen

Minerba khususnya terkait kontrak karya ini," jelas Bambang Haryadi.

Diketahui, PT Agincourt Resources merupakan perusahaan pertambangan dengan spesialisasi eksplorasi dan penambangan logam mulia seperti emas dan perak. Adapun area operasional berada di Tambang Emas Martabe yang meliputi wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Mandailing Natal. —ann/aha



FOTO:ANE/PDT

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Wakil Presiden Direktur Agincourt Resources Ruli Tanio beserta jajaran yang digelar secara virtual di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (1/9/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



I Komang Koheri: Sertifikasi Penting Guna Tingkatkan Kualitas Pekerja Sosial

Anggota Komisi VIII DPR RI I Komang Koheri menilai pentingnya pelatihan berbasis sertifikasi bagi para pekerja sosial guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial (Kesos) di lingkungan Kementerian Sosial. Hal tersebut dikatakan Komang saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Senin (11/9).

"Kami ditugaskan bersama pimpinan Kunsfik ke BBPPKS Lembang, Kabupaten Bandung Barat dalam rangka melihat langsung tempat pelatihannya. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugasnya harus diberikan juga pelatihan, dan pelatihan ini harus juga berstandar dalam artian ada sertifikasinya," ujar Komang.

Politisi PDI Perjuangan Dapil Lampung ini juga memberikan apresiasi kepada Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial setelah melihat kesiapan dari BBPPKS yang ada di Lembang, Bandung Barat tersebut. BBPPKS ini bukan hanya untuk provinsi Jabar, tetapi ini juga meliputi DKI Jakarta, Banten, Lampung, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Lembaga ini memiliki tugas menempa dan membentuk SDM handal serta berkualitas di bidang kesejahteraan sosial.

Komang berharap para pekerja sosial di lembaga-lembaga sosial Indonesia ini dapat ditingkatkan mutu kualitas pelayanannya. Komisi VIII DPR sebagai mitra dari Kemensos selain dukungan anggaran juga memberikan dukungan legislasi terkait aturan perundang-undangan yang juga memungkinkan mempermudah lembaga-lembaga sosial dalam rangka implementasi pasal 34 UUD 1945.

"Pasal itu adalah fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi dalam kegiatan untuk menghadirkan pemerintah atau pun negara di masyarakat ini kan pemerintah tidak bisa sendiri ya, maka mengajak teman-teman dari PKH ini juga Tagana untuk bagaimana sama-sama

memberikan pelayanan kepada kaum miskin, kaum papa, yang harus kita bantu perekonomian agar mereka lebih meningkat kesejahteraannya," tandasnya.

Di lain pihak, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Ridwan Abdullah Putra menjelaskan BBPPKS Lembang di Bandung Barat ini mengembangkan serta melaksanakan pendidikan dan latihan kesejahteraan sosial, metodologi, advokasi dan informasi, juga membangun kerja sama antar lembaga kesejahteraan sosial. Selain kelas dan ruang diskusi, BBPPKS Bandung dilengkapi perpustakaan, wisma, laboratorium pekerjaan sosial, media, dan studio.

— oji/aha



FOTO: OJI/PDI

Anggota Komisi VIII DPR RI I Komang Koheri saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Senin (11/9/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi IX Bentuk Koalisi Bersama Lawan DBD

Demam Berdarah Dengue (DBD) telah menjadi penyakit endemik di tanah air dengan jumlah kasus kematian yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai upaya untuk memberantas dan mencegah penyebaran DBD, DPR RI melalui Komisi IX yang membidangi kesehatan membentuk Koalisi Bersama (Kobar) lawan Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan melibatkan pemerintah maupun swasta.

"Dengan kebersamaan kita semuanya baik pemerintah, DPR, swasta untuk melawan dengue ini, saya yakin angka kematian 0 persen akibat dengue pada tahun 2030 bisa tercapai," ungkap Ketua

Kaukus Kesehatan sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam usai deklarasi Anggota Koalisi Bersama Lawan Dengue di Lapangan Sepak Bola DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/9).

Suir Syam menyampaikan, dengue merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat tanpa memandang usia hingga menyebabkan kematian yang didominasi anak - anak. Ia menilai, dibutuhkan inovasi dalam menekan infeksi DBD yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* dengan penerapan metode Wolbachia.

Lebih lanjut, Politisi dari Fraksi Gerindra ini juga mendorong pencegahan dan penanggulangan

dengue melalui vaksinasi. Berkaca dari penanganan Covid-19, vaksinasi menjadi krusial dan berperan penting. "Kita lihat vaksinasi sangat efektif untuk menghentikan Covid-19. Kita berharap, nanti akan ada vaksin juga untuk dengue ini sehingga dengue bisa kita hilangkan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena menyampaikan butuh kerja sama dan komitmen bersama dari semua pihak untuk menuju nol kematian Dengue di Indonesia pada 2030. "Ini sebuah upaya bersama yang bisa kita gelorakan, apabila kita bisa bergandengan tangan semua anak bangsa baik dari pemerintah pusat, daerah, legislatif, eksekutif, dan pihak swasta beserta seluruh elemen masyarakat, mudah-mudahan kita bisa mencontoh bagaimana penanganan covid di DBD ini," kata Melki.

Melki berpendapat, seluruh pihak memiliki keunggulan dan peran tersendiri untuk menyadari bahaya dengue serta bertindak untuk menanggulangi dengue. Dia pun mendorong upaya promotif preventif dengue sebagai bagian inti dalam agenda transformasi sistem kesehatan Indonesia. "Kita berharap tingkat kordinasinya semakin bagus sehingga kasus dengue ini bisa ditekan benar sampai kasus 0 di 2030 itu bisa tercapai, jadi orang kena dengue mungkin masih ada tetapi kematiannya itu nol persen," imbuh Melki. [ann/rdn](#)



Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam saat deklarasi Anggota Koalisi Bersama Lawan Dengue di Lapangan Sepak Bola DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/9/2023).



Scan QR untuk berita selengkapnya

Lanjut Bahas di Banggar, Komisi X Setuju Pagu Anggaran Sementara 2024 Kemenpora



FOTO: MCN/PDT

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian (dua dari kiri) saat foto bersama usai Rapat Kerja Komisi X DPR bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Komisi X DPR RI menyetujui pagu sementara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebesar Rp2.019 triliun. Usai disepakati bersama, anggaran tersebut akan dibahas lanjut di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

"Kami, Komisi X, menyetujui bahwa pagu sementara Kemenpora pada RAPBN TA 2024 adalah sebesar Rp2.019.137.744," ucap Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian saat membacakan kesimpulan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9).

Secara rinci, anggaran Kemenpora tersebut akan dibagi ke dalam ke dalam 6 (enam) unit kerja. Secara rinci, Sekretariat Kemenpora memperoleh sebesar Rp347,1 miliar, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda sebesar Rp88,9 miliar, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda sebesar Rp82,2 miliar, Deputi Pembudayaan Olahraga sebesar Rp122,6 miliar.

Lalu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi memperoleh sebesar Rp1,35 triliun, dan LPDUK sebesar Rp26 miliar. Adapun demikian, memahami kondisi terkini, Komisi X DPR sepakat menyetujui usulan tambahan pagu sementara Kemenpora dalam RAPBN 2024

sebesar Rp3,7 triliun. Usulan tersebut akan turut disampaikan kepada Banggar DPR.

Terakhir, Politisi Fraksi Partai Golkar itu menyampaikan bahwa Kemenpora perlu mempertimbangkan setiap masukan dan pandangan yang disampaikan oleh setiap Anggota Komisi X DPR demi kejayaan olahraga sekaligus pemuda Indonesia di masa mendatang. "Kami menekankan agar Kemenpora menindaklanjuti setiap masukan dan pandangan dalam setiap penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Kemenpora dalam RAPBN 2024," tandas Hetifah.

ts/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Andreas Susetyo Tagih Tindak Lanjut Bappenas Bahas RPJPN 2025-2045

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menagih tindak lanjut Kementerian PPN/ Bappenas atas pertanyaannya pada 19 Juni 2023 terkait pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Hal tersebut dilontarkannya dalam rapat kerja membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta pada Senin, (11/9).

"Prakarsa Kementerian PPN Bappenas telah disusun sejak Desember 2022 dan diharapkan dapat disahkan paling lambat pada bulan September tahun 2023, sebelum pencalonan Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada 19 Oktober 2023. Sekarang sudah 11 September, Pak," tanya seraya membaca jawaban tertulis yang diberikan Bappenas atas pertanyaannya yang lalu.

Politisi PDI-P ini lantas mengingatkan bahwa jawaban yang diberikan Bappenas atas pertanyaannya terkait pembahasan RPJPN merupakan jawaban resmi. Ia pun lantas menyoroti dan mempertanyakan implikasi batasan waktu yang dikaitkan dengan pendaftaran calon presiden seperti yang tertera pada jawaban Bappenas.

"Saya menggaris bawahi ini 'disampaikan' sebelum pencalonan pasangan (presiden),

Artinya kalau untuk terlewat bagaimana implikasi dari RPJPN ini?" tanya anggota Badan Legislasi ini kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas yang hadir dalam rapat.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/ Kepala Bappenas memberikan penjelasan bahwa undang-undang RPJPN 2025-2045 awalnya masuk dalam Prolegnas 2024. Atas direktif presiden, RPJPN 2025-2045 agar dibahas di tahun 2023. Adapun tahapan-tahapan pembahasan RUU RPJPN 2025-2045 baru bisa dilakukan setelah adanya persetujuan dalam rapat paripurna beberapa waktu silam.

Mengenai pengesahan RPJPN 2025-2045 awalnya diharapkan rampung sebelum masa pendaftaran calon presiden, Kepala Bappenas menuturkan bahwa hal tersebut

ditujukan agar Capres dan Cawapres bisa menjadikan RPJPN 2025-2045 menjadi rujukan penyusunan visi dan misi. Dengan begitu pemerintah berharap akan terjadi sinkronisasi sekaligus terbukanya ruang kreasi dalam penyusunan kebijakan. Bappenas sendiri berharap RPJPN 2025-2045 dapat rampung pada tahun 2023 ini.

uc/rdn

Anggota Komisi XI DPR RI
Andreas Eddy Susetyo.



FOTO: DEP/PDT



Baleg dan Komisi VII Sepakati RUU Migas Jadi Usul Inisiatif DPR RI



Foto: oji/pr

Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi sebagai Ketua Panja Harmonisasi RUU Migas saat rapat Baleg di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Badan Legislasi DPR RI beserta Komisi VII DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menjadi usul inisiatif DPR RI. Sebelumnya, Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas bersama dengan Komisi VII DPR RI menyelenggarakan Rapat Pleno Pengambilan keputusan atas hasil Harmonisasi RUU Migas.

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi sebagai Ketua Panja Harmonisasi RUU Migas menyampaikan,

berdasarkan aspek teknis, substansi dan asas pembentukan perundang-undangan, Panja berpendapat bahwa RUU Migas dapat diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Setelah laporan panja selesai setiap fraksi pun diberikan kesempatan untuk memaparkan pandangannya masing-masing.

"Namun demikian Panja menyerahkan sepenuhnya kepada rapat pleno, apakah rumusan RUU hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh Panja dapat diterima," papar Baidowi di ruang rapat Baleg, Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9).

Dalam rancangan undang-undang tersebut Wakil Ketua Komisi

VII DPR RI Maman Abdurrahman sebagai pengusul menyampaikan bahwa, RUU tersebut bertujuan untuk memberikan kemanfaatan jaminan, sesuai dengan pasal 33 sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia atau pun kesejahteraan rakyat.

Dia pun berharap dengan disahkannya undang-undang migas yang baru ini, bisa mendorong perubahan paradigma, ada semangat yang besar dalam rangka untuk menopang pendapatan negara. Yang mana sampai saat ini legislatif dan eksekutif masih menggunakan lifting migas sebagai asumsi makro APBN.

"Jadi kalau semakin tinggi lifting migas kita, insya Allah pendapatan negara kita juga semakin tinggi. tentunya upaya kita untuk mengalokasikan ke sektor-sektor lain juga semakin tinggi," ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Dia juga mengatakan, dengan percepatan realisasi Undang-Undang Migas, bisa memberikan tambahan semangat dan motivasi serta merangsang para pelaku usaha migas untuk terus melakukan investasi di dunia migas. Di akhir rapat para pimpinan beserta perwakilan fraksi-fraksi melakukan penandatanganan kesepakatan bersama.

"Secara prinsip dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, saya mewakili teman-teman Komisi VII dengan segala rasa bangga dan senang hati menerima pengesahan Rancangan Undang-Undang Migas di Badan Legislasi ini," ungkap Maman.

ssb/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Bahas Transformasi Indonesia, Baleg Terima Usulan Prolegnas Prioritas Tahun 2024

Badan Legislasi (Baleg) DPR menerima usulan tambahan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Usulan yang disampaikan tersebut akan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2024 oleh Baleg DPR dalam rapat panja mendatang.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD Dedi Iskandar Batubara di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

"Setiap masing-masing usulan tersebut akan kami bahas kembali, untuk evaluasi kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023 dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2024 akan dibahas dalam rapat panja," tutur Supratman saat memimpin agenda tersebut.

Diketahui, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengusulkan kembali penambahan satu usulan RUU berupa RUU Tentang Daerah Khusus Jakarta. Dirinya menjelaskan bahwa urgensi RUU ini adalah penyesuaian terhadap Pasal 41 UU Nomor 3 Tahun 2022 yang tercantum UU IKN maka perlu ada penyesuaian sehingga DKI Jakarta tetap menjadi pusat



Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas (kanan) disela-sela Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD Dedi Iskandar Batubara di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2023).

perekonomian dan penopang perekonomian nasional walaupun tidak menjadi ibu kota negara.

Selain itu, Edward juga meminta DPR melalui Baleg DPR turut memprioritaskan RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 mengenai Ombudsman Republik Indonesia dan RUU Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2004 mengenai Komisi Yudisial. Ia berharap masing-masing RUU tersebut masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2024.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PPUU DPD Dedi Iskandar Batubara mengusulkan penambahan 2 (dua) RUU agar dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2024. Di antaranya, RUU Pelayanan Publik sebagai

pengganti UU Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan RUU Tentang Pemerintahan Digital.

Dedi memaparkan bahwa 2 (dua) RUU tersebut krusial untuk disusun lebih lanjut lantaran demi penyelenggaraan pemerintahan, baik tingkat pusat maupun daerah, bisa terlaksana secara mangkus dan sangkil yang sesuai dengan dinamika perubahan budaya masyarakat dan teknologi terkini. Di sisi lain, ia berharap masing-masing RUU tersebut mendorong percepatan transformasi digital di bidang pemerintahan sekaligus membangun ekosistem digital nasional yang mengatur hubungan pemerintah demi efektivitas pembangunan nasional.

ts/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Evaluasi APBN 2022, Pemerintah Harusnya Lebih Optimalkan Penerimaan

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM RI serta Gubernur BI pada Kamis (7/9) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Banggar RI Charles Meikyansyah mengatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih mengoptimalkan penerimaan lantaran masih adanya banyak ruang fiskal meski penerimaan perpajakan telah melampaui target.

"Meminta kepada pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Meskipun melampaui target sebesar 114 persen yang mencapai Rp2.034,5 triliun. Namun, kita masih melihat ada ruang fiskal yang cukup besar jika pemerintah mampu mengatasi permasalahan kekurangan dan keterlambatan penerimaan pajak atas kekurangan dan keterlambatan penyetoran pajak dari wajib pajak," tutur Charles saat menyampaikan Pendapat Mini Fraksi Partai NasDem dalam Pembicaraan Tingkat I, RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Lebih lanjut, ia meminta Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



FOTO: JKA/PDT

Anggota Badan Anggaran RI Charles Meikyansyah saat menyampaikan Pendapat Mini Fraksi Partai NasDem dalam Pembicaraan Tingkat I, RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Kamis (7/9/2023) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

dan Piutang Bukan Pajak serta penyelesaiannya. Hal tersebut berkaitan dengan masih terdapatnya permasalahan terkait keterlambatan pembayaran ataupun kurang pungut serta penerimaan PNBPN yang belum memiliki dasar hukum. Piutang negara yang macet pun turut menjadi catatan tersendiri.

"Mengharapkan pemerintah untuk mengoptimalkan penyelesaian piutang negara yang macet terutama pada debitur kategori BUMN sesuai dengan rekomendasi dengan menyusun aksi optimalisasi penyelesaian piutang negara dan mengamankan

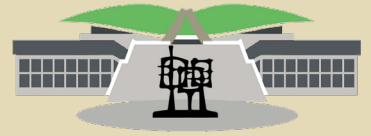
hak tagih piutang negara dalam proses likuidasi serta menetapkan status hukum enam debitur koperasi yang tidak diketahui keberadaannya," ujar Charles yang juga Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Partai NasDem menyatakan dapat menerima Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dan nantinya disahkan menjadi undang-undang.

uc/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya





ANGGOTA PARLEMEN REMAJA (PARJA) 2023 SIMULASI KUNJUNGAN KERJA KE POLRESTA BOGOR KOTA, RABU (13/9/2023). FOTO: PRIMA



ANGGOTA PARJA 2023 SIMULASI RAPAT PARIPURNA, GEDUNG NUSANTARA II, SENYAN KAMIS (14/9/2023). FOTO: PRIMA



PEMBUKAAN PARLEMEN REMAJA 2023 DI WISMA DPR RI, KOPO, BOGOR, SENIN (11/9/2023). FOTO: PRIMA

